

TERKENDALI



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

Bantul , 2 Desember 2019

Nomor : W13.U5/³⁰⁶⁴/OT.01.1/XII/2019

Perihal : Undangan Pengawasan Bidang

Lampiran : -

Kepada

Yth. 1. Kasubbag Kepegawaian
2. Staf Subbag Kepegawaian
Pada Pengadilan Negeri Bantul
Di Bantul

Dengan Hormat,

Mengharap kehadiran Saudara/i dalam acara Pengawasan Bidang bulan Oktober - November 2019 yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 2 Desember 2019

Jam : 14.00 WIB

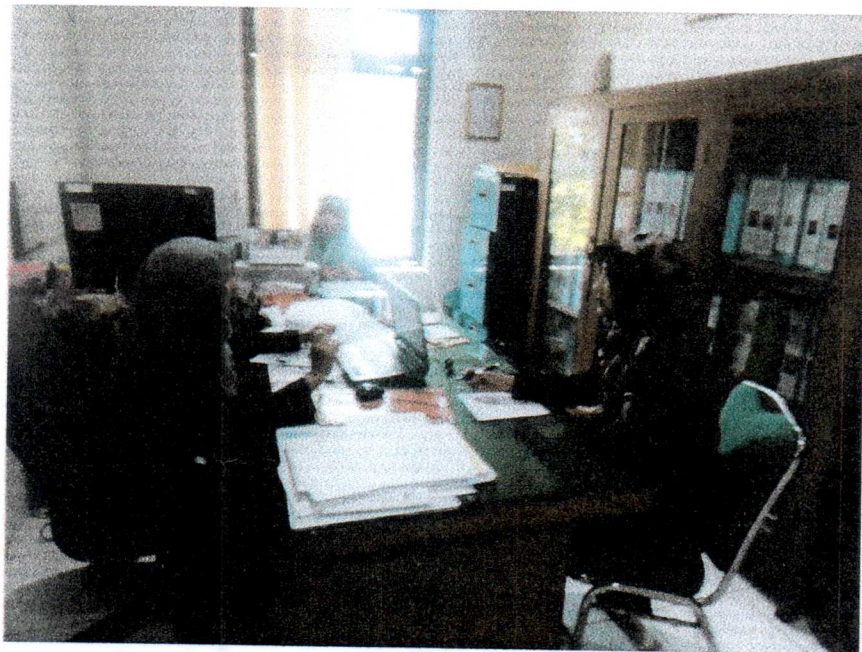
Tempat : Ruang Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri Bantul

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara/i tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

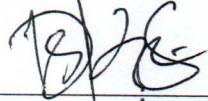


Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian ,
Organisasi dan Tata Laksana
Pengadilan Negeri Bantul

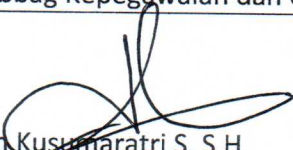
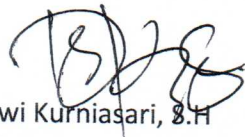
DEWI KURNIASARI, S.H.,
NIP. 197812222001122001

Dokumentasi Pengawasan Subbag kepegawaian dan Ortala bulan Oktober – November 2019
2 Desember 2019



DAFTAR HADIR PENGAWASAN BIDANG BULAN DESEMBER 2019

NO.	Nama	Jabatan	TTD
1.	Dewi Kurniasari, S.H	Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian dan Ortala	
2.	Niken Kusumaratri S, S.H	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
3	Asiani Lakobi, S.E	Staf Subbag Kepegawaian dan Ortala	

Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian dan Ortala
 Niken Kusumaratri S, S.H NIP. 19305262002122001	 Dewi Kurniasari, S.H NIP. 197812222001122001

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
BIDANG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA PENGADILAN NEGERI BANTUL
BULAN OKTOBER-NOVEMBER 2019**



Oleh :

**Hakim Pengawas Bidang
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI
DAN TATA LAKSANA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan.

1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor: 02 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 08 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal 3 ayat (1) dan (2);
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I dan Buku II (Edisi Revisi);
6. Buku IV Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
7. Surat Keputusan KPN Bantul Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Bantul ;

B. Ruang Lingkup Pengawasan.

1. Administrasi peradilan bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, terdiri dari: prosedur tata persuratan, pengarsipan berkas kepegawaian, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala dan usulan promosi jabatan;
2. Kedisiplinan pegawai meliputi: absensi kehadiran dan pulang serta apel Senin pagi dan Jumat sore;
3. Update dan pembaharuan data aplikasi SIKEP;

C. Tujuan Pengawasan.

1. Untuk memantau pelaksanaan Manajemen Kepegawaian secara baik dan benar;
2. Untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas kepegawaian.

3. Memberikan masukan berupa temuan-temuan fakta permasalahan-permasalahan yang terdapat dilapangan, memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindaklanjuti dan dalam mengambil keputusan;

D. Metodologi Pengawasan.

1. Memeriksa yang terkait dengan Manajemen Peradilan khususnya di Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
2. Melakukan pemeriksaan teknis administratif kepegawaian terhadap berkas-berkas pegawai;
3. Memeriksa seluruh berkas/ bendel pegawai, seluruh buku monitor (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti) dll, dengan cara mengamati apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan tugas dan Buku Bindalmin (Buku II MA-RI Edisi Revisi);
4. Wawancara dengan beberapa pejabat dan staf yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

BAB II HASIL PENGAWASAN

A. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebelumnya

a. Berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya yaitu :

1. Pengisian LLK pegawai belum dilaksanakan ;
2. Dalam rangka program kerja dimana hakim dan pegawai yang sering terlambat/pulang cepat lebih dari 3 (tiga) kali belum ditempel di papan pengumuman ;
3. Mengenai aplikasi SIKEP ada kendala mengenai Kenaikan Pangkat Otomatis yaitu pegawai atas nama Anggoro namanya muncul kembali naik pangkat di April 2020 ;

b. Sebab :

1. Kurangnya kesadaran dari pegawai untuk membuat LLK.
2. Papan pengumuman tidak ada sehingga tidak ada tempat untuk menempel ;
3. Di aplikasi SIKEP muncul kenaikan pangkat otomatis per April 2020 atas nama Anggoro padahal atas nama pegawai Anggoro sudah kenaikan pangkat per April 2019 ;

c. Akibat :

1. Kinerja pegawai menjadi tidak terukur dan hal ini berkaitan dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai sebagaimana Surat SEKMA RI No.106-1/SEK/KU.01/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Aplikasi e-LLK sebagai Pengukuran Kinerja secara elektronik yang digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja ;
2. Kedisiplinan hakim dan pegawai menjadi tidak terkontrol ;
3. Kenaikan pangkat atas nama pegawai Anggoro muncul kembali padahal sudah naik pangkat ;

d. Rekomendasi:

1. Agar dilakukan sosialisasi kembali mengenai pentingnya mengisi LLK ;
2. Agar segera disediakan papan pengumuman untuk menempel nama hakim dan pegawai yang sering terlambat/pulang cepat berkaitan dengan budaya malu (reward and punishmen) ;
3. Untuk dikonsultasikan ke Pengadilan Tinggi agar tidak muncul dalam aplikasi SIKEP nama yang sudah naik pangkat tersebut ;

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengisian LLK pegawai belum dilaksanakan ;
2. Dalam rangka program kerja dimana hakim dan pegawai yang sering terlambat/pulang cepat lebih dari 3 (tiga) kali belum ditempel di papan pengumuman ;
3. Mengenai aplikasi SIKEP ada kendala mengenai Kenaikan Pangkat Otomatis yaitu pegawai atas nama Anggoro namanya muncul kembali naik pangkat di April 2020 ;

BAB IV

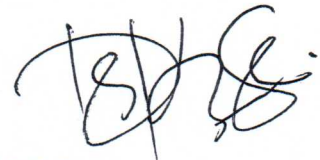
REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

2. Agar segera disediakan papan pengumuman untuk menempel nama hakim dan pegawai yang sering terlambat/pulang cepat berkaitan dengan budaya malu (reward and punishmen) ;
3. Untuk dikonsultasikan ke Pengadilan Tinggi agar tidak muncul dalam aplikasi SIKEP nama yang sudah naik pangkat tersebut ;

2 Desember 2019

Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana
Pengadilan Negeri Bantul



DEWI KURNIASARI, SH